

## PERAN DINAS PARIWISATA DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PANTAI DI KOTA MAKASSAR

Putri Widyaningsih<sup>1\*</sup>, Jaelan Usman<sup>2</sup>, Syukri<sup>3</sup>

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

### Abstract

*This study purposed to find out the role of the Department of Tourism in the development of coastal tourism objects in Makassar City. This study used descriptive qualitative research with the number of informants was 5 people. The data analysis technique used data reduction, data presentation, and conclusion making. Then the data was collected through interviews, observations, and documentation studies. The results of this study showed that the role of the Tourism Office in Developing Coastal Tourism Objects in Makassar City was seen from the motivator aspect, facilitator aspect, and dynamic aspect. Judging from the motivator aspect, it was not optimal, from the facilitator aspect, it had not run optimally because the provision of facilities and infrastructure had not been adequate, and from the dynamic aspect of all tourism development on the Tanjung Bayang beach was purely from the Community Empowerment Institute but it had not been realized properly. So it was not able to develop tourism objects optimally.*

**Keywords:** *role, development, tourist attraction*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Pariwisata dalam pengembangan objek Wisata Pantai di Kota Makassar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan jumlah informan 5 orang. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan kemudian data penelitian ini dikumpul melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Pariwisata dalam mengembangkan objek wisata pantai di Kota Makassar dilihat dari aspek motivator, aspek fasilitator, aspek dinamisator. Dilihat dari aspek motivator belum optimal, dilihat dari aspek fasilitator belum berjalan secara maksimal dan optimal karena penyediaan sarana dan prasarannya belum memadai, dan dilihat dari aspek dinamisator segala pengembangan pariwisata di pantai tanjung bayang murni dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat akan tetapi belum terealisasikan dengan baik sehingga belum mampu mengembangkan objek wisata secara maksimal dan optimal.

**Kata kunci:** peran, pengembangan, objek wisata

---

\* putriwidyaningsih@gmail.com

## PENDAHULUAN

Beberapa tempat wisata yang paling digemari masyarakat Makassar yaitu Anjungan Pantai Losari, Pantai Akkarena, Pulau Khayangan, Pulau Samalona, Benteng Rotterdam, Kawasan Lego-Lego, Pantai Tanjung Bayang dan lain-lainnya. Namun, yang menjadi fokus utama dalam adalah Pantai Tanjung Bayang. Dikarenakan minimnya fasilitas di Pantai Tanjung Bayang dan kurangnya perhatian pemerintah dan masyarakat setempat yang dapat dilihat dari tidak tertatanya dengan baik objek wisata tersebut. Pj Walikota Makassar, M. Iqbal Samad Suhaeb, mengatakan jika kondisi Pantai Tanjung Bayang kini cukup semrawut. Sebenarnya kondisi pantai pada lokasi tersebut cukup baik, hanya saja memang belum tertata dengan baik. Terkait bangunan-bangunan yang ada disekitar Pantai Tanjung Bayang. Sehingga dinilai Pantai Tanjung Bayang belum optimal untuk menjadi tempat wisata. Objek wisata tersebut tampaknya tidak punya sarana prasarana dan kurang nyaman untuk dikunjungi. M. Iqbal Samad Suhaeb menegaskan bila ada pihak swasta yang ingin berinvestasi, maka dipersilahkan tentunya dengan berbagai syarat.

Berdasarkan pernyataan dari M. Iqbal Samad Suhaeb tersebut memperlihatkan bahwa ketidakmampuan pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata untuk mengelola Pantai Tanjung Bayang. Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin mengatakan, penataan kawasan Tanjung Bayang bahkan sudah di program di 2021. Hanya saja ia belum merinci besaran anggaran yang dialokasikan. Menurut Rudy Djamaluddin pengembangan Pantai Tanjung Bayang masih menunggu dana hibah dari kementerian dan usulan Dinas Pariwisata, dan juga dana insentif daerah (DID) baru bisa melihat penjabaran APBD 2021. Team leader Yayasan Konservasi Laut (YKL), Muhammad Fauzi menyampaikan dalam kegiatan gerakan bersama bersih pantai dan laut di Pantai Tanjung Bayang pada Minggu, 15 Maret 2020, bahwa dalam waktu sekitar dua jam peserta kegiatan tersebut telah mengumpulkan sebanyak 1436, 12 kg sampah disepanjang pantai Tanjung Bayang, Pantai Layar Putih dan Pantai Angin Mammiri yang memiliki panjang sekitar 1 km. Dimana dari hasil bersih pantai dan laut terlihat bahwa sampah yang mendominasi adalah sampah plastik sekali pakai. Ini tentu berbahaya bagi kesehatan laut mengingat bahwa

sampah plastik dan *styrofoam* memerlukan ribuan tahun untuk bisa terurai. Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut dapat dilihat bahwa kenyataan yang terjadi di Pantai Tanjung Bayang berbanding terbalik dengan kewajiban pemerintah pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 pasal 23 ayat 1c. Dimana seharusnya pemerintah mampu memelihara, mengembangkan, dan melestarikan objek wisata yang dimiliki. Namun, yang terlihat belum adanya kerja sama yang baik antara pemerintah, pengelola/petugas tempat wisata maupun masyarakat.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muthia Misdrinaya yang berjudul “Strategi Komunikasi Pemasaran Dinas Pariwisata Kota Makassar Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Kota Makassar” dari penelitian tersebut peneliti ingin tahu bagaimana strategi pemasaran dinas pariwisata dalam meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara di Kota Makassar, dari penelitian di atas dan beberapa penelitian lainnya belum ada yang meneliti tentang “Peran Dinas Pariwisata Dalam Mengembangkan Objek Wisata Di Kota Makassar” maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut.

Teori peran (*role theory*) mengemukakan bahwa peran adalah sekumpulan tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam satu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain *relative* bebas pada seseorang yang menjalankan peran tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat”. Peranan lebih banyak menunjukkan suatu fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi tepatnya adalah seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Soekanto (1987).

Menurut Poerwodarminta (1995) “Peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa”. Berdasarkan pendapat Poerwadarminta maksud dari tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa tersebut merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat.

Pariwisata salah satu sumber pendapatan negara yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan perekonomian suatu negara. Kawasan

pariwisata di Indonesia begitu mudah dikembangkan dengan melakukan perbaikan infrastruktur, keamanan, tata kelola yang baik agar dapat menciptakan kawasan pariwisata yang diminati pengunjung wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri. Pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau berkelompok dalam jangka waktu tertentu dari satu tempat ke tempat yang lainnya yang telah direncanakan sebelumnya dengan tujuan untuk berlibur atau urusan bisnis sehingga kepentingannya dapat terpenuhi.

Menurut Yoeti (1997) pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan sementara waktu, dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud tujuan bukan berusaha mencari nafkah di tempat yang ia kunjungi, tetapi semata-mata sebagai konsumen menikmati perjalanan tersebut untuk memenuhi keinginan yang bermacam-macam. Menurut Meis (1992) pariwisata adalah sebuah konsep yang perlu dipahami untuk dianalisis dan sebagai bahan pengambilan keputusan. Namun hampir di semua Negara tidak memahami hal ini sehingga muncul berbagai permasalahan yang menyulitkan industri untuk berkembang secara realitas atau kredibel yang berkaitan dengan informasi pariwisata yang

mendasar, dalam memprediksi kontribusinya baik untuk regional, nasional dan perekonomian global. Theobald (2005).

Definisi pariwisata dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu definisi pariwisata yang didekati dari sisi wisatawan, definisi pariwisata yang dipandang dari dimensi industri atau bisnis, sedangkan kategori ketiga memandang pariwisata dari dimensi akademis dan sosial budaya. Dari ketiga definisi tersebut kesimpulannya bahwa hadirnya industri dan bisnis ini muncul untuk bagaimana sebuah wilayah dapat menaikkan sektor ekonomi disebuah daerah yang tidak dapat melupakan sebuah sosial budaya dari daerah.

Smith (2013) mengungkapkan pariwisata edukasi berperan sebagai sarana peningkatan standar akademik sehingga program wisata studi menjadi agenda rutin, sebagai bagian dari kurikulum di sekolah atau merupakan kegiatan ekstrakurikuler.

Menurut Sugiono dkk (2008), kata pengembangan mengandung pengertian pembangunan secara bertahap dan teratur serta yang menjurus ke sasaran yang dikehendaki. Mengembangkan adalah menjadikan besar, atau memperluas. Pengembangan pariwisata harus direncanakan secara hati-hati agar dampak yang timbul dapat

dikontrol. Di dalam perencanaannya perlu dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh disetiap daerah maupun kota yang memiliki objek dan daya tarik unggul, berpotensi untuk dikembangkan, dan rintisan untuk dijadikan objek dan daya tarik wisata. Betapa pentingnya respon pemerintah dalam pengembangan pariwisata.

Menurut Sunaryo (2013) pembangunan pariwisata merupakan suatu proses perubahan pokok yang dilakukan oleh manusia secara terencana pada suatu kondisi kepariwisataan tertentu yang dinilai kurang baik, yang diarahkan menuju ke suatu kondisi kepariwisataan tertentu yang dianggap lebih baik atau diinginkan.

Menurut Suwanto (2004) unsur pokok yang harus mendapat perhatian guna menunjang pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pengembangannya meliputi lima unsur yaitu objek dan daya tarik wisata, prasarana wisata, sarana wisata, tata laksana/infrastruktur dan masyarakat/lingkungan. Sektor pariwisata sangat diperlukan strategi dalam pengembangan kepariwisataan yang terencana atau teratur agar kekuatan yang dimiliki bisa dikembangkan secara efektif. Dalam hal

meningkatkan sektor pariwisata pemerintah sebagai pelaksana yang mempunyai kewenangan penuh dalam mengembangkan pariwisata.

Paturusi (2001) menyatakan bahwa pengembangan merupakan suatu strategi yang digunakan untuk memajukan, memperbaiki, dan meningkatkan kondisi kepariwisataan suatu daya tarik wisata sehingga dapat dikunjungi wisatawan. Mill (2000:168) menyatakan bahwa pada dasarnya pengembangan pariwisata dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan permasalahan.

Pitana dan Gayatri (2005) Motivator adalah seseorang yang memiliki profesi atau pekerjaan yang bisa memberikan masukan kepada orang lain. Motivasi juga merupakan salah satu faktor penting bagi wisatawan dalam memutuskan untuk memilih tujuan wisata yang akan dikunjungi. Dengan adanya motivasi menyebabkan orang bertindak untuk melakukan kunjungan wisata, seperti termotivasi kenyamanan dan keindahan yang ditawarkan oleh panorama pantai tersebut.

Menurut Fahmi (2016), motivasi dibagi kedalam dua bentuk dasar yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik muncul dari luar diri seseorang,

kemudian selanjutnya mendorong orang tersebut untuk membangun dan menumbuhkan semangat motivasi pada diri orang tersebut untuk merubah seluruh sikap yang dimiliki olehnya saat ini ke arah yang lebih baik sedangkan motivasi intrinsik (dari dalam diri seseorang/kelompok) Motivasi intrinsik adalah motivasi yang muncul dan tumbuh serta berkembang dalam diri orang tersebut, yang selanjutnya kemudian mempengaruhi dia dalam melakukan sesuatu secara bernilai dan berarti. Menurut Suwena (2017), ada dua faktor penting yang memotivasi seseorang untuk melakukan kegiatan berwisata, yaitu faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor Pendorong (*push factors*), faktor yang mendorong seseorang untuk berwisata adalah ingin terlepas (meskipun hanya sejenak) dari kehidupan yang rutin setiap hari, lingkungan yang tercemar, kecepatan lalu lintas dan hiruk pikuk kesibukan di kota sedangkan faktor penarik (*pull factors*), faktor ini berkaitan dengan adanya atraksi wisata di daerah atau di tempat tujuan wisata. Atraksi wisata ini dapat berupa kemashuran akan objek, tempat-tempat yang banyak diperbincangkan orang, serta sedang menjadi berita. Dorongan berkunjung ke tempat teman atau keluarga atau ingin menyaksikan kesenian serta

pertandingan olahraga yang sedang berlangsung juga menjadi daya tarik di daerah tujuan wisata.

Pitana dan Gayatri (2005), Fasilitator adalah pengembangan potensi pariwisata peran pemerintah adalah menyediakan segala fasilitas yang mendukung segala program yang diadakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Adapun pada prakteknya pemerintah bisa mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak, baik itu swasta maupun masyarakat.

Fasilitas wisata dapat diartikan suatu sarana dan prasarana yang harus disediakan oleh pengelola untuk kebutuhan wisatawan. Kebutuhan wisatawan tidak hanya menikmati keindahan alam atau keunikan objek melainkan memerlukan sarana dan prasarana wisata. Pemerintah berupaya untuk memfasilitasi penunjang sarana dan prasarana, selain itu juga memfasilitasi promosi obyek wisata, sampai dengan pemeliharaan objek wisata atau destinasi wisata. Penyediaan sarana dan prasarana menyerahkan penuh kepada pelaku objek wisata atau destinasi wisata, pemerintah hanya memberikan atau membantu sejumlah dana atau anggaran dalam pengembangan objek wisata dan desa wisata jika ada yang mengajukan dan meminta untuk dikembangkan melalui

surat, *whatsapp*, telepon maupun datang langsung. Namun juga dalam pemberian bantuan tersebut harus memenuhi kriteria yang ada seperti memiliki potensi yang dapat dijual dan dikembangkan, didukung oleh *stakeholder*, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah desa, dan kelembagaan yang ada di desa. Sarana dan prasarana yang dibangun oleh masyarakat melalui dana dari pemerintah adalah kamar mandi, mushola, tempat sampah, penyediaan bangunan tidak permanen untuk berwirausaha, tempat parkir, perbaikan akses jalan menuju objek wisata dan berbagai pendukung-pendukung pariwisata lainnya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, bahwa setiap pembangunan destinasi wisata haruslah berlandaskan pada pendekatan pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka tidak ada jalan lain untuk mencapai tujuan itu selain membangun industri pariwisata yang melibatkan masyarakat di dalamnya.

Pitana dan Gayatri (2005) dalam pilar *good governance*, agar dapat berlangsung pembangunan yang ideal, maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik. Pemerintah daerah sebagai

salah satu *stakeholder* pembangunan pariwisata memiliki peran untuk mensinergikan ketiga pihak tersebut, agar diantaranya tercipta suatu simbiosis mutualisme demi perkembangan pariwisata.

Sebagai upaya dinamisasi antar *stakeholder* pengembang pariwisata pemerintah selama ini telah melakukan berbagai hal terkait dengan kerja sama antar sektor, baik itu sektor swasta, sektor pemerintahan lainnya, maupun masyarakat. Kerjasama dengan berbagai sektor swasta yaitu swasta, organisasi pemerintah dan masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis dan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Untuk kebutuhan pengumpulan data primer, peneliti memperoleh dari informan berdasarkan hasil wawancara. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah Kasubid Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata, Staff/Pelaksana Dinas Pariwisata, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Sekretaris Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Petugas Pos Pantai Tanjung Bayang, Pos Keamanan Pantai Tanjung Bayang, Masyarakat.

Data sekunder yang terdapat dalam penelitian ini yaitu data yang

dikumpulkan peneliti dari berbagai dokumen-dokumen yang bersifat informasi tertulis yang digunakan dalam penelitian terkait peran Dinas Pariwisata dalam pengembangan objek wisata pantai di Kota Makassar. Pengumpulan data yang digunakan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik pengabsahan data menggunakan triangulasi teknik dan teknik analisis data adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Makassar merupakan kota metropolitan terbesar di kawasan Indonesia Timur dan pada masa lalu pernah menjadi ibu kota Negara Indonesia Timur dan Provinsi Sulawesi. Makassar terletak di pesisir barat daya Pulau Sulawesi dan berbatasan dengan Selat Makassar di sebelah barat, Kabupaten Kepulauan Pangkajene di sebelah utara, Kabupaten Maros di sebelah timur dan Kabupaten Gowa di sebelah selatan.

Dengan memiliki wilayah seluas 175,77 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk lebih dari 1,5 juta jiwa, kota ini berada di urutan kelima kota terbesar di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung dan Medan. Secara demografis, kota ini tergolong tipe multi etnik atau multi kultur dengan beragam suku bangsa

yang menetap di dalamnya, di antaranya yang signifikan jumlahnya adalah Suku Makassar, Bugis, Toraja, Mandar, Buton, Jawa, dan Tionghoa. Makassar juga memiliki beberapa tempat wisata pantai yang sangat digemari oleh masyarakat untuk berlibur bersama keluarga seperti Pantai Akkarena, Pulau Lae-Lae, Pulau Kodingareng Keke, Pulau Samalona, Pantai Tanjung Bayang. Namun yang menjadi fokus utama adalah Pantai Tanjung Bayang, karena pantai tersebut ramai dikunjungi oleh masyarakat selain lokasinya mudah dijangkau disana juga memiliki banyak penginapan (*villa*) yang harganya cukup terjangkau.

Pantai Tanjung Bayang beralamat di Jalan Selat Tanjung Merdeka, tanjung bayang salah satu wisata bahari yang berdekatan dengan pantai akkarena, pantai berpasir yang menjadi tujuan favorit masyarakat saat akhir pekan. Sejarah pemberian nama Tanjung Bayang ini adalah karena di dekat pantai ini terdapat danau yang bernama Tanjung Bayang. Karena pantai dekat dengan danau ini selalu ramai di akhir minggu. Sehingga para pengunjung yang rutin berkunjung ke pantai tersebut memberikan nama yang sama dengan danau di dekatnya. Selain aman dan indah, berkunjung ke pantai tanjung bayang hanya membutuhkan



biaya yang murah untuk masuk ke pantai tersebut yaitu lima ribu rupiah untuk motor dan untuk mobil membutuhkan sepuluh ribu rupiah.

Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di bagian Selatan Pulau Sulawesi yang dahulu disebut Ujung Pandang, terletak antara 119°24'17'38" Bujur Timur dan 5°8'6'19" Lintang Selatan yang berbatasan sebelah Utara dengan Kabupaten Maros, sebelah Timur Kabupaten Maros, sebelah selatan Kabupaten Gowa dan sebelah Barat adalah Selat Makassar. Kota Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-2° (datar) dan kemiringan lahan 3-15° (bergelombang). Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi. Kota Makassar memiliki kondisi iklim sedang hingga tropis memiliki suhu udara rata-rata berkisar antara 26°C sampai dengan 29°C.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar dalam Kota Makassar Dalam Angka 2021, hasil sensus penduduk yang telah dilakukan pada tahun 2020 menunjukkan sebanyak 1.423,877 jiwa penduduk di Kota Makassar. Kenaikan jumlah penduduk sebesar 0,60 persen jika dibandingkan dengan hasil sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2010.

Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat daerah Kota Makassar, Sebagai langkah lanjutan dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan maka penjabaran strategi pembangunan ke dalam program dan kegiatan perlu dilakukan. Program merupakan penjabaran tentang kegiatan adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Makassar terkait bersama seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pada dasarnya program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Makassar Tahun 2022-2026 mengacu pada permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang terdiri atas lima program, yakni: Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, program pemasaran pariwisata, program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

## **Motivator**

Pitana dan Gayatri (2005) Motivator adalah seseorang yang memiliki profesi atau pekerjaan yang bisa memberikan masukan kepada orang lain. Motivasi juga merupakan salah satu faktor penting bagi wisatawan dalam memutuskan untuk memilih tujuan wisata yang akan dikunjungi.

Dinas Pariwisata Kota Makassar dalam hal ini sebagai motivator terhadap Wisata Pantai Tanjung Bayang telah maksimal menjadi motivator, karena telah membentuk kelompok dan memberi dukungan pelatihan manajemen pengelolaan daya tarik wisata agar masyarakat lebih memperhatikan poin-poin penting dalam tujuan mengembangkan tempat wisata tersebut dan telah melakukan kordinasi dengan masyarakat setempat dalam hal pengembangan pantai tanjung bayang.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan peran dinas pariwisata belum terlalu maksimal terhadap pantai tanjung bayang karena belum memberikan sosialisasi ataupun arahan kepada masyarakat, kurangnya kerja sama antar masyarakat untuk merealisasikan penataan Pantai Tanjung Bayang.

## **Fasilitator**

Pitana dan Gayatri (2005), Fasilitator adalah pengembangan potensi pariwisata peran pemerintah adalah menyediakan segala fasilitas yang mendukung segala program yang diadakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Adapun pada prakteknya pemerintah bisa mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak, baik itu swasta maupun masyarakat.

Dinas Pariwisata Kota Makassar dalam hal ini sebagai fasilitator terhadap wisata Pantai Tanjung Bayang, membantu teman-teman yang berada di Pantai Tanjung Bayang untuk mendapatkan csr (*corporate social responsibility*) yang cocok, agar kemudian dapat menambah sebagian keperluan di tempat wisata seperti gazebo, tempat sampah, atau keperluan lainnya. Berdasarkan hasil observasi di lapangan peran dinas pariwisata sebagai fasilitator, dinas pariwisata hanya berkordinasi dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) tetapi belum datang memberikan bantuan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tanjung Bayang sangat mengharapkan bantuan dari dinas pariwisata untuk membina tanjung bayang, tetapi hingga saat ini belum adanya kerja sama yang baik.

## **Dinamisator**

Pitana dan Gayatri (2005) dalam pilar *good governance*, agar dapat berlangsung pembangunan yang ideal, maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik.

Dinas Pariwisata Kota Makassar dalam hal ini sebagai dinamisator terhadap wisata Pantai Tanjung Bayang. Dinas pariwisata sudah berupaya untuk bekerja sama dengan masyarakat di daerah wisata agar dapat mengembangkan objek wisata dengan baik dengan melibatkan masyarakat, kelompok sadar wisata dan perusahaan untuk bekerja sama.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan peran dinas pariwisata sebagai dinamisator belum optimal maka dari itu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sangat mengharapkan pemerintah agar lebih memperhatikan Pantai Tanjung Bayang karena hingga kini tempat wisata tersebut murni dikelola oleh LPM dan masyarakat setempat.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan pembahasan yang ada, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Peran Dinas Pariwisata Dalam Pengembangan Objek Wisata di Pantai

Tanjung Bayang belum efektif, pengelola tanjung bayang sangat berharap pemerintah segera mengambil peran dalam hal pengembangan wisata pantai tanjung bayang. Pemerintah sebagai motivator belum optimal karena dalam kenyataannya belum ada peran dari Dinas Pariwisata Kota Makassar untuk memotivasi masyarakat setempat atau pelaku usaha yang berada di objek wisata tersebut untuk menjaga lingkungan serta berperan aktif dalam pelestarian Pantai Tanjung Bayang. Peran pemerintah sebagai fasilitator belum berjalan secara maksimal dan optimal karena penyediaan sarana dan prasarannya belum memadai, dinas pariwisata hanya berkoordinasi dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan hanya menjanjikan akan membantu memfasilitasi segala kekurangan yang ada di pantai tanjung bayang akan tetapi sampai saat ini belum ada bantuan, dan pemerintah sebagai dinamisator segala pengembangan pariwisata di pantai tanjung bayang murni dari LPM dan bekerja sama dengan masyarakat akan tetapi belum terealisasikan dengan baik sehingga belum mampu mengembangkan objek wisata secara maksimal dan optimal dan dari para pelaku objek wisata atau destinasi

wisata yang masih rendah dalam melayani pengunjung.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, H., & Hafied, C. (1996). *Prinsip Prinsip Hubungan Masyarakat*. Surabaya: usaha nasional.
- Amalyah, R., Hamid, D., & Hakim, L. (2016). Peran *Stakeholder* Pariwisata Dalam Pengembangan Pulau Samalona Sebagai Destinasi Wisata Bahari. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 37(1). <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/1439>
- Anggraeni, D. F., & Fadlurrahman. (2018). Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Dalam Pengembangan Objek Wisata. *JMAN: Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara*, 2(1).
- Luturlean, B.S., dkk (2019). *Strategi Bisnis Pariwisata (p. 4)*. Bandung: humaniora.
- Bulan, T. P. L., Junaida, E., & Maitama, M. H. (2021). Daya Tarik Wisata, Motivasi dan Keputusan Berkunjung di Objek Wisata Pantai Berawe. *Jurnal Akuntansi Audit dan Perpajakan Indonesia (JAAPI)*, 3(1). <https://jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/JAAPI/article/view/733/526>
- Djafar, R. (2020). Aksi Bersih Pantai Kumpulkan 1436 kg Sampah didominasi plastik [Halaman Web]. Diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2020/03/18/aksi-bersih-pantai-kumpulkan-1436-kg-sampah-didominasi-plastik/>
- Hamel, A., Ogotan, M., & Tulus, F. (2017). Peranan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Pengembangan Objek Wisata Di Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Administrasi Publik*, 3 (046). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/16524>
- Amerta, I. M. S. (2019). *Pengembangan pariwisata alternatif*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Indriani, VR. (2020). Genjot Sektor Wisata, Kawasan Pantai Tanjung Bayang Bakal di tata [Halaman Web]. Diakses dari <https://makassar.sindonews.com/read/222048/711/genjot-sektor-wisata-kawasan-pantai-tanjung-bayang-bakal-ditata-1604639493>
- Manahati Zebua. (2016). *Pengembangan Pariwisata Daerah*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.